

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kota Vatikan merupakan sebuah negara di Eropa Selatan tepatnya berada di dalam Kota Roma, Italia, yang memiliki keistimewaan dengan posisinya sebagai pusat agama Katolik dunia. Umat Katolik menjadikan Negara Kota Vatikan sebagai poros dan kiblat dalam menjalankan peribadatannya. Negara Kota Vatikan didirikan setelah penandatanganan Pakta Lateran antara Takhta Suci dan Italia pada tanggal 11 Februari 1929, dan diratifikasi pada tanggal 7 Juni 1929.

Istilah Vatikan digunakan pada zaman kuno untuk mengidentifikasi daerah berawa di tepi kanan Sungai Tiber, antara Jembatan Milvio dan Jembatan Sixtus sekarang. Selama monarki dan zaman republikan, daerah itu dikenal sebagai Ager Vaticanus. Ini meluas ke utara sejauh mulut Cremera dan selatan setidaknya sejauh Janiculum. Di zaman Kekaisaran Romawi, dari abad ke-2 M., toponim Vaticanum diaplikasikan pada area yang kira-kira sesuai dengan Kota Vatikan sekarang.¹

Selama periode Romawi, daerah di luar kota Roma direklamasi. Nero (54-68 M) membangun vila-vila, taman, dan sebuah nekropolis hingga menjadi sebuah sirkus kecil. Pada 324 M, Kaisar Konstantin membangun sebuah gereja besar hingga secara berangsur sirkus kecil Nero pun runtuh. Adapun cerita seorang Petrus yang menderita akibat penganiayaan yang diperintahkan Nero telah mencuri perhatian peziarah Kristen, dan

¹ Vatican City State, *History*, (diakses pada 04 Juni 2017); diambil dari <http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/storia/la-citta-del-vaticano-nel-tempo.html>.

kebanyakan dari mereka ingin untuk berada di dekat Santo Petrus. Untuk mengenang Peter, Leo IV (847-855) membangun dinding "sivitas" bernama "Leonina" yang menjadi pusat spiritual Romawi abad pertengahan dan Renaisans.²

Selain itu, Paus Nicholas V (1447-1455) merencanakan proyek untuk memperbesar Basilika, tetapi proyeknya tersebut harus ditinggalkan ketika Turki mulai maju dan Konstantinopel jatuh. Antara 1477 dan 1480 Paus Sixtus IV (1471-1492) mulai membangun sebuah kapel besar bernama "Sistina" yang diresmikan pada 15 Agustus 1483. Perubahan besar diperkenalkan oleh Julius II (1503-1513), yang secara radikal mengubah kota kecil tersebut.³

Pada dasarnya, sejarah Gereja Katolik melakukan misinya mengumumkan kebenaran Injil bagi keselamatan seluruh umat manusia dan dalam pelayanan perdamaian dan keadilan mendukung semua bangsa, baik melalui berbagai gereja yang tersebar di seluruh dunia, serta melalui pemerintah pusat. Pemerintahan pusat yang dimaksud adalah Paus dan Departemen Kuria Romawi. Paus hidup di Negara Kota Vatikan di mana terdapat beberapa Departemen Kuria Romawi tersebut.⁴

Dalam membahas keistimewaan negara dari perspektif agama, Republik Islam Iran merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang memiliki keunikan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Republik Islam Iran lahir sebagai negara agama pasca terjadinya Revolusi

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Vatican City State, *History*, (diakses pada 22 Maret 2017); diambil dari <http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/stato-e-governo/storia/la-citta-del-vaticano-oggi.html>.

Iran tahun 1979. Sebelum Revolusi Iran, Republik Islam Iran dikenal dengan nama Iran atau Persia.

Pada 3 Februari 1979, Khomeini mengumumkan pembentukan “Dewan Revolusi” dan meminta Syahpur Bakhtiar mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Jika tidak, Khomeini mengancam akan ada perang suci. Syahpur pun akhirnya mengundurkan diri. Dinasti Pahlevi yang didirikan pada 1925, akhirnya dapat ditumbangkan dengan kekuatan revolusi. Tumbangnya Dinasti ini sekaligus juga tumbangnya sistem monarki yang sudah 2000 tahun diterapkan di Iran. Revolusi Iran tersebut mengandung makna yang bersifat global. Untuk pertama kalinya di era modern, tokoh agama (ulama) mampu dan berhasil melawan sebuah rezim modern, dan mengambil alih kekuasaan negara.⁵

Iran dipimpin oleh para ulama, sebuah dinasti yang dipimpin bertahun-tahun dan terakhir adalah Syah Reza Pahlevi dengan angkatan darat terkuat nomor lima di dunia ketika itu, tunduk oleh seorang ulama besar yang bertahun-tahun hidup di pengasingannya karena diusir. Hanya dengan kemampuan pidato yang direkam lewat kaset, ulama yang tidak bersenjata dan sepanjang hari berpakaian seperti manusia di abad ketujuh ini, mampu kembali ke negerinya dengan kemegahan, persis sebagaimana Nabi Muhammad Saw kembali menundukkan Kota Mekkah setelah terusir ke Madinah. Ulama besar itu adalah Ayatullah Rohullah Khomeini

⁵ The Iranian, *The Iranian Revolution: King Pahlavi (the Shah) | The Pahlavi Monarchy Falls | Political Divisions, Cleric Power and Totalitarianism*, (diakses pada 04 Juni 2017); diambil dari <http://www.fsmitha.com/h2/ch29ir.html>.

yang menjadi Imam dan Faqih.⁶ Khoimeini kemudian memutuskan untuk mendirikan Republik Islam Iran.

Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran digolongkan ke dalam negara berasaskan agama. Yang menjadi salah satu determinannya yaitu wilayah atau geografis. Negara Kota Vatikan sendiri berada di dalam Kota Roma, Italia yang sangat besar pengaruhnya dari zaman Kekaisaran Romawi. Sedangkan Republik Islam Iran berada di daerah Timur Tengah yang sebagian wilayahnya berbasis agama Islam.

Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran merupakan dua negara yang menjalankan sistem politik dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai agama, dan hukum-hukum dari Tuhan. Keduanya menggunakan nilai-nilai agama dan ajaran dari Tuhan sebagai pedoman dalam bernegara. Negara Kota Vatikan sendiri berdasarkan agama Katolik, sedangkan Republik Islam Iran berdasarkan nilai-nilai Islam. Kedua negara tersebut menjalankan roda pemerintahannya atas dasar agamanya masing-masing.

Terkait pemimpin negara, Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran memilih pemimpin negara berdasarkan tanggungjawab dan ilmu agama yang dimiliki. Artinya, kedua negara tersebut dipimpin oleh seorang ahli agama yang juga merupakan representasi dari Tuhan. Dalam konteks ini, Negara Kota Vatikan dipimpin oleh seorang Paus, sedangkan Republik Islam Iran dipimpin oleh Wali Faqih.

Ditinjau dari perspektif normatif, terdapat persamaan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran dalam menjalankan roda pemerintahannya. Agama dan

⁶ Inu Kencana Syafii. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 229.

pemimpin negara merupakan dua indikator yang sangat melekat dalam sistem pemerintahan Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran. Secara umum, Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran merupakan representasi dari negara agama atau negara yang menerapkan sistem pemerintahan teokrasi dalam menjalankan kehidupan bernegaranya.

Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran merupakan dua negara yang memiliki karakteristik dalam pemerintahannya. Di samping itu, melihat dari unsur negara, kedua negara memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah dan rakyat menjadi dua indikator persamaan lain di samping indikator agama dan kepala negara.

Komparasi antara dua negara yang berbeda dengan menjalankan satu sistem politik yang sama perlu dikaji atau diteliti guna mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penerapan sistem politik tersebut. Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran dengan sistem politik teokrasinya perlu mendapat kajian yang lebih detail, karena keduanya memiliki keunikan dalam sistem politik dan pemerintahannya. Kedua negara tersebut memiliki persamaan dalam menjalankan roda pemerintahannya, yaitu dengan menggunakan Hukum Ilahi atau Kedaulatan Tuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan “Bagaimana perbedaan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran?”

C. Kerangka Pemikiran

Bagi setiap negara, sistem politik menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan pemerintahannya, begitu pun bagi Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran. Kedua negara ini memiliki sistem politik berasaskan Ketuhanan yang mengatur jalannya pemerintahan dan menjadi pedoman dalam bernegara. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori **perbandingan politik**, konsep **teokrasi**, dan konsep **unsur negara** sebagai kerangka pemikiran untuk membantu dalam menganalisis komparasi penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran.

1. Teori Perbandingan Politik

Ilmu politik pada dasarnya mencakup banyak hal, tetapi dalam kajiannya memiliki beberapa studi khusus, seperti studi perbandingan. Perbandingan politik telah lama menjadi studi politik. Banyak ahli atau pun *comparatism* yang telah menganalisa berbagai perbedaan melalui prosedur dalam pemerintahan negara, termasuk sistem politiknya.

Dalam memperbandingkan lembaga-lembaga dan proses-proses itu biasanya melalui 3 (tiga) tahap. Salah satu dari tahapan tersebut yaitu tahapan kegiatan deskriptif. Ahli politik mengarahkan perhatiannya pada keseluruhan sistem politik atau pun bagian-bagian sistem itu, seperti badan legislatif, birokrasi, sistem kepartaian, dan lembaga politik lain.⁷

Perbandingan politik menjadi suatu kajian yang memiliki kedudukan cukup penting dalam ranah ilmu politik. Dalam konteks ini, teori perbandingan politik dapat diaplikasikan dengan “Perbandingan Sistem Politik

⁷ Mochtar Mas'ood, Colin MacAndrews. 1993. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran”, di mana dalam menelaah kedua negara tersebut melalui deskripsi terkait bagian-bagian dari sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran.

2. Konsep Teokrasi

Teokrasi identik dengan kedaulatan Tuhan di mana kekuasaan dan otoritas berada di tangan seorang ahli agama yang dipercaya sebagai pemimpin atas representasi Tuhan. Pada awalnya, konsep teokrasi muncul sebagai konsep sederhana ketika seorang ulama atau ahli agama yang memerintah sebuah negara. Di samping itu, teokrasi cenderung dalam bentuk pemerintahan yang monarki dengan membedakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Adapun penjelasan tentang hubungan antara negara dengan agama oleh seorang filsuf dan ahli politik dengan nuansa “ketuhanan”nya yaitu Thomas Aquinas sebagai berikut.

Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf yang banyak membicarakan Tuhan, alam, hukum, politik dan juga negara. Pada mulanya Aquinas merupakan seorang yang seorang filsuf yang mendalami agama Kristen secara mandalam dan pemikirannya selalu berkaitan dengan hal-hal mengenai Tuhan. Hal tersebutlah kemudian yang juga menyebabkan banyak pemikiran-pemikiran Aquinas mengenai negara, politik dan hukum lebih mengacu karena adanya agama, atau lebih tepatnya Tuhan.⁸ Dalam konteks ini, Aquinas sendiri memberikan perimbangan antara negara dan gereja. Negara

⁸ Rizky, Alfionita, *Pemikiran Politik Barat: Thomas Aquinas*, 2013, (diakses pada 06 Mei 2017); diambil dari http://alfionita-rizky-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-117406-Pemikiran%20Politik%20Barat-Pemikiran%20Politik%20Barat%20:%20Thomas%20Aquinas.html.

hendaknya dipimpin oleh seorang raja dalam masalah keduawian, sedangkan gereja dikuasai penuh oleh seorang Paus.

Thomas Aquinas dalam tulisannya *De Regimine Principum* memiliki pandangan mengenai negara, yaitu negara memiliki fungsi spiritual keagamaan yang sakral, dan negara bersifat hierarki. Maksudnya yaitu ada yang memerintah, menata pemerintahan dan ada yang mentaatinya. Dalam hubungannya dengan kekuasaan Tuhan, tujuan akhir hidup manusia adalah kesenangan dan kebaikan terhadap Tuhan, maka contoh dari kekuasaan Tuhan di dunia ini adalah pemuka agama, paus, petrus, dan lain-lain.⁹ Aquinas telah mengungkapkan bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan.

Ajaran Kristiani, St. Agustin menyatakan adanya “kota Tuhan” (City of God) yang merupakan negara yang diberkahi oleh Tuhan untuk mencegah manusia dari kezaliman dan agar dipenuhi oleh kasih.¹⁰ Tidak ada kekuatan manusia yang dapat menandingi kekuatan Tuhan. Gereja menjadi dominan pada masa Abad Pertengahan. Adapun adopsi atau dogma pada masa tersebut sangat terikat, di mana siapa yang menentang pemimpin atau raja itu berarti menentang Tuhan pula.

Pada masa sekarang, teokrasi dalam definisi sebenarnya sudah jarang negara yang menerapkan sistem tersebut. Adapun jenis teokrasi yang diterapkan oleh beberapa negara yaitu teokrasi monarki elektif. Teokrasi monarki elektif yaitu sistem pemerintahan di mana hukum dan aturan sebuah negara berasaskan agama, dan dipimpin oleh seorang kepala negara ahli agama yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*. 2016. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta. Hal. 237

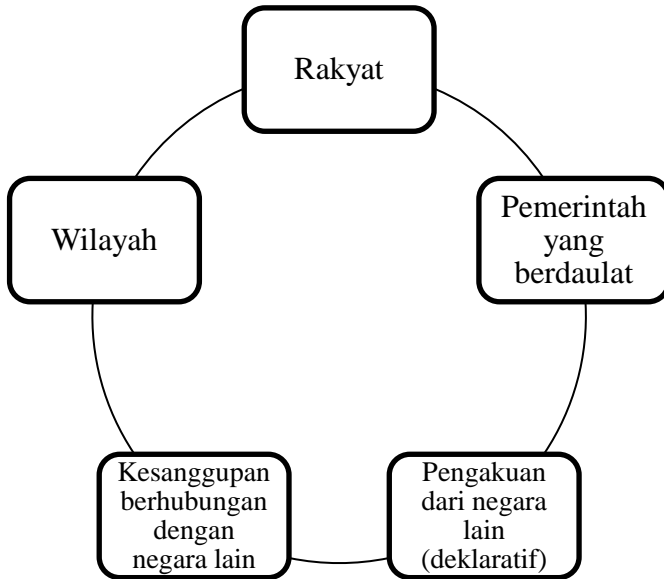
dipilih melalui pemilihan khusus, bukan turun temurun. Teokrasi lain yang juga menjadi alternatif beberapa negara dalam menerapkan sistem pemerintahannya yaitu teodemokrasi. bermakna bahwa Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu dibatasi norma-norma yang datangnya dari Tuhan.¹¹

Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran menjadi representasi negara yang menggunakan sistem politik teokrasi dalam politik dan pemerintahannya. Kedua negara ini menerapkan teokrasi yang di dalamnya masih memegang teguh ajaran suatu agama yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai agama dan Hukum Ilahi menjadi pedoman kedua negara dalam menjalankan politik dan pemerintahannya.

3. Konsep Negara

Negara merupakan sebuah kelompok sosial yang mendiami suatu wilayah yang diorganisasi di bawah pemerintah atau lembaga politik berdaulat yang memiliki tujuan atas kepentingan nasionalnya. Adapun unsur-unsur suatu negara menurut Konvensi Montevideo, meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, serta pengakuan dari negara lain (deklaratif).

¹¹ Era Muslim, *Khilafah, Teokrasi, dan Teo-demokrasi*, 2017, (diakses pada 07 Mei 2017); diambil dari <https://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/khilafah-teokrasi-dan-teo-demokrasi.htm#.WTQJldwIG00>.



Gambar 1.1 Unsur-unsur Negara menurut Konvensi Montevideo

a. Rakyat

Rakyat merupakan unsur utama dalam suatu negara, mereka adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut.

Rakyat sendiri dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk serta warga negara dan bukan warga negara.

- 1.) Penduduk merupakan orang yang berdomisili atau menetap dalam suatu negara

- 2.) Bukan penduduk merupakan orang-orang yang sementara waktu berada dalam suatu negara, contohnya para turis.
 - 3.) Warga negara merupakan orang-orang yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu negara.
 - 4.) Bukan warga negara merupakan orang-orang yang berada dalam suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada, contohnya duta besar.¹²
- b. Wilayah

Wilayah suatu negara merupakan kesatuan ruang yang meliputi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial.

1.) Daratan

Daratan ialah tempat bermukimnya warga atau penduduk suatu negara. Wilayah daratan suatu negara, mempunyai batas-batas tertentu yang diatur oleh hukum negara dan perjanjian dengan negara tetangga.

2.) Udara

Udara merupakan seluruh ruang yang berada di atas batas wilayah suatu negara, baik daratan ataupun lautan.

3.) Lautan

Lautan merupakan wilayah suatu negara yang terdiri atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), dan landasan benua (kontinen). Laut teritorial suatu negara merupakan batas sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pantai. Zona

¹² Markijar, *5 Unsur-unsur Negara (Menurut Konvensi Montevideo)*, 2017, (diakses pada 28 November 2017); diambil dari <http://www.markijar.com/2017/2016-unsur-unsur-negara-menurut-konvensi.html>.

tambahan yaitu 12 mil dari garis luar lautan teritorial atau sekitar 24 mil dari garis pantai suatu negara. ZEE merupakan wilayah lautan sepanjang 200 mil laut diukur dari garis pantai. Sedangkan, landasan benua ialah wilayah lautan yang terletak di luar teritorial, berjarak sekitar 200 mil diukur dari garis pantai yang meliputi dasar laut dan daerah di bawahnya.¹³

4.) Ekstrateritorial

Wilayah ekstrateritorial suatu negara ialah tempat di mana menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun letaknya berada di negara lain. Contohnya, kantor kedutaan besar Indonesia di luar negeri disebut sebagai wilayah ekstrateritorial Indonesia.

c. Pemerintah yang berdaulat

Pemerintahan yang berdaulat dapat dikatakan sebagai aktor atau dalam konteks ini disebut pemerintah yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertinggi untuk mengatur, menjaga, dan menjalankan roda pemerintahan.

d. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain

Unsur kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain artinya suatu negara mampu melakukan kerja sama atau menjalin hubungan dengan negara lain di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan politik.

e. Pengakuan dari negara lain

Adapun unsur deklaratif dari suatu negara yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Hal ini menjadi bukti legal akan terbentuknya suatu negara sehingga dapat terhindar dari berbagai ancaman dari negara lain.

¹³ *Ibid.*

Atas pengakuan ini pula selanjutnya suatu negara dapat bekerja sama dengan negara lain.

Dari kelima unsur negara di atas, unsur utama, yaitu rakyat akan dikorelasikan dengan “Perbandingan Sistem Politik Teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran”. Jika dilihat dari perspektif unsur negara rakyat, Negara Kota Vatikan memiliki keistimewaan, karena rakyatnya terdiri dari berbagai negara atau transnasional. Para uskup yang berada di berbagai negara menjadi satu bukti bahwa rakyat Negara Kota Vatikan melintasi batas wilayahnya. Sedangkan Republik Islam Iran, rakyatnya orang-orang yang berada di negaranya, sesuai definisi rakyat pada umumnya.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka hipotesis yang penulis ambil yaitu adanya persamaan dan perbedaan dalam penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran. Adapun hasil sementara perbedaan penerapan sistem politik teokrasi antara Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran, yaitu jenis teokrasi, dan rakyat serta status kewarganegaraan.

E. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan yang berjudul “Perbandingan Sistem Politik Teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran” ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui tentang penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran.
2. Mendeskripsikan perbandingan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran.

3. Memberikan informasi bahwa setiap negara dengan sebuah sistem politik yang sama tidak berarti sama pula dalam pengaplikasiannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁴ Selain itu, peneliti juga menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁵ Wawancara digunakan sebagai salah satu metode penulisan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini yaitu:

Bab I memuat pendahuluan. Pendahuluan sendiri disusun untuk memaparkan hal-hal mendasar terkait penulisan. Dalam pendahuluan ini memaparkan latar

¹⁴ Mohammad Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁵ Karya Tulisku, *Teknik Pengumpulan Data (Wawancara, Angket, dan Observasi)*, (diakses pada 14 Desember 2017); diambil dari <http://www.karyatulisku.com/2016/04/teknik-pengumpulan-data-wawancara.html>.

belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penulisan, metode analisis dan pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II mendeskripsikan profil Negara Kota Vatikan. Bab ini memuat tentang sejarah Negara Kota Vatikan, serta Negara Kota Vatikan sebagai negara pusat agama Katolik sedunia. Eksistensi Negara Kota Vatikan yang juga menggunakan sistem politik teokrasi dalam pemerintahannya akan dibahas secara umum di bab ini.

Bab III mendeskripsikan profil Republik Islam Iran. Bab ini memuat tentang sejarah Republik Islam Iran, serta Republik Islam Iran sebagai negara agama, yaitu Islam. Transformasi perubahan bentuk negara juga akan dibahas dalam bab ini. Iran yang pada awalnya dikenal sebagai Persia hingga akhirnya menjadi Negara Islam, dan memilih teokrasi sebagai sistem politik dalam pemerintahannya.

Bab IV memaparkan terkait perbedaan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran. Bab ini akan membahas perbedaan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai alat pembedanya. Kemudian akan dideskripsikan terkait hasil perbedaan penerapan sistem politik teokrasi di Negara Kota Vatikan dan Republik Islam Iran tersebut.

Bab V memuat kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan sebuah garis besar dari penulisan ini. Profil Negara Kota Vatikan sebagai pusat agama Katolik sedunia, dan profil Republik Islam Iran sebagai negara agama akan dimuat dalam bab ini secara umum. Hasil perbandingan dengan menggunakan indikator-indikator juga akan ditulis kembali dalam bab ini secara general.